*ProBisnis : Jurnal Manajemen, 17 (5) (2026) pp. 3243-3253*

Published by: Lembaga Riset, Publikasi, dan Konsultasi Jonhariono

ProBisnis : Jurnal Manajemen

Journal homepage: www.jonhariono.org/index.php/ProBisnis

# Analisis Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas (*Community Based Tourism*) di Kawasan Penyangga Taman Nasional Tambora untuk Meningkatkan Ekonomi Lokal

**Sri Rahmawati[1], Muh. Syahru Ramadhan[2], Desi Rubiyanti[3]**
[1,3]Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia
[2]Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia

**ARTICLE INFO**

***Article history:***

Received Oct 16, 2026
Revised Oct 30, 2026
Accepted Nov 16, 2026

***Kata Kunci:***

Ekowisata
Pariwisata Berbasis Komunitas
Ekonomi Lokal
Strategi Pengembangan
Taman Nasional Tambora

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi pariwisata di Kawasan Penyangga Taman Nasional Tambora yang belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat lokal akibat lemahnya tata kelola dan rendahnya partisipasi warga. Penelitian kualitatif deskriptif ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi potensi wisata, mengevaluasi tingkat partisipasi, dan merumuskan strategi pengembangan yang tepat. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman. Hasil penelitian menemukan bahwa kawasan tersebut memiliki kekayaan alam dan sejarah yang bernilai sangat tinggi. Namun, penerapan pariwisata berbasis komunitas masih berada pada tahap awal inisiasi. Kapasitas kelembagaan lokal yang belum matang, keterbatasan sarana prasarana penunjang, serta minimnya sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kendala utama yang menghambat perputaran ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini merekomendasikan strategi penguatan sumber daya manusia melalui kemitraan strategis, pembenahan fasilitas fisik, dan pembentukan regulasi pelestarian lingkungan berbasis kerakyatan demi menjamin kemandirian ekonomi serta keberlanjutan ekologi destinasi.

*This is an open access article under the CC BY-NC license.*

***Corresponding Author:***

Sri Rahmawati,
Prodi Manajemen,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis,
Jl. Syech Muhammad Lingkar Utara Sawete Bali I Dompu, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Email: s.rahmawati2101@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia saat ini menunjukkan akselerasi yang signifikan seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap pariwisata alam dan tingginya dukungan kebijakan dari berbagai pihak. Potensi wisata lokal menjadi salah satu indikator dalam pembangunan kepariwisataan nasional, di mana setiap daerah dituntut untuk mengelola keunikan destinasi mereka masing-masing secara maksimal. Oleh karena itu, penggalian dan pengelolaan pariwisata lokal yang terukur tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan daya saing suatu destinasi, tetapi juga harus berorientasi pada penciptaan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berdiam di sekitar kawasan wisata tersebut (Andayani et al., 2024). Dalam konteks ini, keberhasilan sektor pariwisata sangat bergantung pada seberapa besar ruang partisipasi yang diberikan kepada entitas lokal.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu etalase ekowisata Indonesia yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari bentang alam pesisir, wilayah laut, hingga lanskap pegunungan tropis yang eksotis. Mengelola peluang besar ini, pemerintah daerah NTB terus berupaya mengoptimalkan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan agar berdampak positif pada pembangunan ekonomi wilayah sejak dekade 1980-an (Hasri, 2024). Di antara berbagai opsi wisata unggulan, ekowisata atau taman wisata alam hadir sebagai alternatif pemanfaatan jasa lingkungan yang selaras dengan keberlanjutan. Melalui aktivitas ekowisata, ancaman eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dapat ditekan secara masif, sekaligus memberikan masyarakat peluang untuk beranjak dari sekadar objek menjadi subjek aktif dalam aktivitas pariwisata (Hidayah, 2020).

Untuk menjamin peran aktif warga sekitar, pendekatan ekowisata wajib diintegrasikan dengan kerangka kerja wisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* (CBT). Pendekatan pariwisata ini secara spesifik menitikberatkan pada proses pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam merencanakan, mengelola, serta mengawasi operasional sumber daya wisata di wilayahnya (Nurhidayati & Fandeli, 2012). Telah banyak negara berkembang yang sukses mengadopsi CBT sebagai katalisator pengentasan kemiskinan, karena CBT terbukti empiris mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, mendiversifikasi perekonomian lokal, serta melestarikan warisan budaya dan ekologi secara beriringan (Anuar & Sood, 2017). Pendekatan komprehensif semacam ini adalah investasi jangka panjang untuk memaksimalkan kapasitas lokal sekaligus menekan kelemahan maupun ancaman dari model massalisasi pariwisata (Hamzah & Khalifah, 2009).

Implementasi CBT juga terbukti sangat relevan dan selaras dengan mandat desentralisasi dan otonomi daerah. Masyarakat desa di kawasan wisata diberi kewenangan untuk secara mandiri mengoptimalkan potensi wilayahnya, sehingga kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian alam turut meningkat secara organik di daerah (Tyana & Satlita, 2023). Hal ini merepresentasikan prinsip utama pembangunan keberlanjutan yang dikampanyekan oleh lembaga pariwisata global, bahwa pariwisata yang sehat harus memfasilitasi bisnis inklusif dan mempromosikan edukasi lingkungan hidup di tengah masyarakat (UNWTO, 2015). Wujud nyatanya terlihat dari menjamurnya konsep penyediaan *homestay*, di mana wisatawan tidak hanya mengejar keindahan alam natural, tetapi turut mengeluarkan biaya untuk memvalidasi dan merasakan langsung harmoni pengalaman kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan yang menenangkan (Zukharman et al., 2023).

Namun demikian, ketahanan ekonomi lokal melalui CBT tidak akan terwujud tanpa sinergitas dan intervensi positif dari para pemangku kepentingan (Handayani et al., 2024). Kolaborasi yang kohesif mensyaratkan pemerintah untuk hadir tidak hanya sebagai penyusun regulasi, tetapi juga fasilitator yang mengawal edukasi keterampilan manajemen bagi warga lokal (Aziz, 2008; Hakim et al., 2024). Peran struktural pemerintah ini sangat penting dalam mendiseminasi kebijakan inklusif, memastikan keadilan retribusi ekonomi, serta memastikan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat berjalan optimal (Giampiccoli et al., 2014; Mtapuri & Giampiccoli, 2016). Tanpa bimbingan yang terstruktur, keterbatasan pemahaman kelompok awam dalam memetakan potensi sumber daya di wilayahnya serta berbagai kendala internal kapasitas sumber daya manusia acap kali menjadi titik awal kegagalan program pemberdayaan kawasan pariwisata (Negara et al., 2024).

Lebih jauh lagi, transformasi dari model pariwisata konvensional menuju sistem CBT memiliki kompleksitas tantangan di lapangan yang sulit diremehkan. Kendala dominan yang kerap menghambat kemajuan CBT meliputi defisit akses pendanaan, rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola, hingga belum siapnya sosiokultural masyarakat merespons pergeseran tata kehidupan akibat intervensi wisatawan luar (Rahayu & Utami, 2016). Parameter kesiapan mental dan struktural inilah yang menjadi penentu hidup-matinya konsep CBT, khususnya ketika program tersebut dialokasikan pada kawasan yang peruntukan utamanya adalah sebagai zona lindung layaknya Kawasan Penyangga Taman Nasional Gunung Tambora.

Taman Nasional Tambora di NTB sejatinya menyimpan daya pikat rekreasi *ecotourism* yang paripurna, mulai dari potensi wisata pendakian kaldera bersejarah, *jungle tracking*, wisata tirta, hingga area spesifik untuk paralayang dan *bird watching* (Argubi & Hendra, 2018). Sayangnya, urgensi permasalahan mulai muncul ketika dinamika pariwisata di wilayah tersebut memicu polarisasi antara pengelola dan pemerhati lingkungan akibat kekhawatiran rusaknya tatanan

konservasi (masalah ekologis). Di samping itu, pengelolaan atraksi wisata di area penyangga Tambora saat ini masih belum mencerminkan integrasi utuh antara pihak pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat (masalah tata kelola). Ketiadaan sinkronisasi ini mengakibatkan perputaran sektor wisata gagal memberikan impak ekonomi yang signifikan bagi pemukim di sekitar area tersebut.

Terkait permasalahan tersebut, terdapat kesenjangan riset (*research gap*) pada berbagai penelitian sebelumnya. Beberapa studi memang telah mengeksplorasi potensi pariwisata dan kajian CBT pada wilayah agrowisata maupun desa wisata (Kirana & Artisa, 2020; Yanti & Fajri, 2023), namun sebagian besar masih berupa inventarisasi kekayaan alam makro (Bramsah & Darmawan, 2017) atau sebatas analisis fasilitas dasar di zona pemanfaatan Taman Nasional (Sahupala, 2023), dan belum menyentuh secara menyeluruh kerangka integrasi *Community Based Tourism* pada lanskap dengan status hukum "Kawasan Penyangga (*Buffer Zone*)" sebuah Taman Nasional. Hal inilah yang menjadikan penelitian ini sangat mendesak (urgen) dan memiliki arti penting secara praktis maupun teoretis; yaitu sebagai pijakan untuk melahirkan skema penyusunan tata kelola ekowisata yang terencana (*well-planned*) dan berkelanjutan (*sustainable*), agar CBT tidak sekadar menjadi jargon kebijakan, tetapi menjadi realita model mitigasi kemiskinan warga sekitar Tambora tanpa mengkhianati fungsi kelestarian konservasi hutan (Argubi & Hendra, 2018).

Berpijak dari fenomena dan kesenjangan studi di atas, penulis bermaksud mengkaji rumusan strategi yang komprehensif melalui penelitian berjudul "Analisis Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas (*Community Based Tourism*) di Kawasan Penyangga Taman Nasional Tambora untuk Meningkatkan Ekonomi Lokal". Penelitian ini diarahkan secara spesifik untuk menjawab tiga tujuan utama, yaitu: (1) Mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi atraksi serta kendala internal maupun eksternal pengembangan ekowisata di kawasan penyangga Tambora; (2) Menganalisis sejauh mana bentuk nyata partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam manajemen ekowisata yang ada saat ini; dan (3) Merumuskan strategi terbaik dan terukur untuk mengimplementasikan *Community Based Tourism* (CBT) demi merealisasikan pertumbuhan kesejahteraan warga yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Pendekatan Pengembangan Pariwisata Berbasis *Ecotourism*

Tren pariwisata global saat ini menunjukkan pergeseran minat wisatawan menuju destinasi yang menawarkan orisinalitas alam (*natural originality*) dan kelestarian sumber daya yang khas, berkualitas, serta langka. Merespons tingginya peluang pasar tersebut, Juhanda (2013) menegaskan bahwa strategi pengembangan ekowisata harus dilakukan melalui pemetaan pasar yang akurat, pemberdayaan sumber daya manusia lewat sinergi lintas sektor (pemerintah, LSM, dan swasta), serta penentuan skala prioritas untuk membangun citra (*image*) destinasi yang unik. Pada akhirnya, seluruh tahapan strategis tersebut wajib diimplementasikan dengan berlandaskan pada prinsip Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community-based Tourism Development*), yang menuntut pengembang untuk berbaur dan menempatkan warga lokal sebagai penggerak utama dalam merancang sistem pariwisata transformatif berbasis kearifan setempat.

### Pengertian Strategi

Strategi merupakan metode dasar sekaligus rencana taktis sistematis yang didesain agar visi dan misi organisasi dapat tercapai secara progresif (Grede dalam Hasri, 2024). Dalam tata kelola destinasi wisata, penyusunan strategi mencakup pengelolaan kompetensi, alokasi sumber daya, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan (Rozalena & Dewi dalam Hasri, 2024). Suryono (dalam Primadany et al., 2013) menegaskan bahwa esensi strategi selalu bertumpu pada rumusan "tujuan, sarana, dan cara" yang pelaksanaannya sangat membutuhkan kepekaan sosiologis untuk mengantisipasi peluang maupun risiko. Oleh karena itu, demi memaksimalkan potensi kepariwisataan daerah, pemerintah dituntut proaktif merumuskan strategi pengembangan sarana dan prasarana wisata yang selaras dengan tatanan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal (Safitri & Whinarko, 2020; Sanjaya, 2018).

**Pengertian Pariwisata**
Secara terminologi, Suswanto (2004) menjelaskan bahwa kata "pariwisata" diserap dari bahasa Sanskerta, yakni "pari" (berputar-putar/berkali-kali) dan "wisata" (perjalanan), yang esensinya merupakan aktivitas perpindahan manusia ke luar tempat tinggalnya karena berbagai motif seperti ekonomi, sosial budaya, hingga psikologis. Diperdalam oleh Yoeti (2008), makna etimologis ini sejatinya lebih ekuivalen dengan istilah *travel* atau *tour* ketimbang pemahaman *tourism* secara harfiah. Sementara itu, dari sudut pandang yuridis formal berdasarkan UU No. 9 Tahun 1990, kepariwisataan mencakup ekosistem yang lebih luas, yang tidak hanya terbatas pada aktivitas pelancong, tetapi juga melibatkan segala bentuk usaha objek wisata, penyedia atraksi, dan rantai bisnis jasa pendukungnya.

**Pengertian Ekowisata**
Berdasarkan definisi global dari *The International Ecotourism Society* (TIES) dan *World Conservation Union*, ekowisata merupakan kegiatan perjalanan ke kawasan alam yang masih otentik dengan tujuan utama untuk konservasi ekologis, perlindungan warisan budaya, serta penciptaan peluang ekonomi berbasis partisipasi masyarakat lokal. Dari sudut pandang industri pariwisata, Wood (dalam Yoeti, 2008) memosisikan ekowisata sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Oleh karena itu, ekowisata bukanlah sekadar aktivitas melancong biasa, melainkan kegiatan rekreasi profesional dan teredukasi yang dirancang untuk menggerakkan motor ekonomi pedesaan. Parameter keberhasilan tata kelola ekowisata ini tidak diukur dari keuntungan finansial semata, melainkan dari sejauh mana kesejahteraan penduduk lokal dapat meningkat sejalan dengan terjaganya kelestarian lingkungan hidup di kawasan tersebut.

**Pengembangan Pariwisata**
Pengembangan pariwisata merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang mewajibkan sinergi lintas sektoral untuk mengelola pariwisata sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi dan pemicu ganda (*multiplier effect*) bagi penyerapan lapangan kerja dari hulu ke hilir (Sari, 2011). Secara teoretis, pengembangan pariwisata adalah upaya strategis terukur untuk meningkatkan nilai guna suatu destinasi wisata tanpa mengeksploitasi aset lokal di dalamnya. Melalui perencanaan desain (*master plan*) yang matang, program pengembangan pariwisata mutlak dituntut untuk mendistribusikan keuntungan secara inklusif guna meningkatkan kesejahteraan finansial, kohesi sosial kemasyarakatan, dan vitalitas budaya komunal bagi para warga yang bermukim di sekitar kawasan tersebut (Primadany, Mardiyono, & Riyanto, 2013).

**Ekonomi Lokal**
Ekonomi lokal merupakan turunan dari ilmu ekonomi regional yang secara khusus menganalisis disparitas potensi sosiogeografis dengan mengintegrasikan dimensi keruangan ke dalam sistem kapital suatu kawasan (Muljadi, 2009; Sjafrizal, 2012). Secara konseptual, kajian ekonomi wilayah dan perkotaan ini berfokus pada hubungan kausalitas antara letak geografis atau penataan infrastruktur spasial terhadap tingkat produktivitas dan kapabilitas ekonomi masyarakat penyangganya. Melalui telaah keunggulan komparatif keruangan yang komprehensif ini, pemangku kebijakan dapat merumuskan program yang akomodatif guna mentransformasi potensi suatu daerah menjadi sentra pariwisata maupun produksi komoditas mandiri yang memiliki nilai jual tinggi (Sjafrizal, 2012).

**Pengembangan Ekonomi Lokal**
Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan wujud kemitraan kolaboratif antara pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan pelaku pasar yang bertujuan untuk menstimulasi aktivitas kewirausahaan serta memperluas lapangan kerja berbasis keunggulan komparatif lokal (Blakely & Bradshaw, 2002; Helmsing, 2001). Dalam implementasinya, skema inklusif ini menuntut revitalisasi menyeluruh yang mencakup restrukturisasi kelembagaan, identifikasi pasar yang inovatif (*new market identification*), dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (World Bank, 2001; ILO, 2005). Sebagai instrumen strategis untuk meretas stagnasi ekonomi wilayah, desain PEL secara filosofis diorientasikan untuk memfasilitasi akses pasar, mempercepat transfer pengetahuan, serta

memberikan pembinaan berkesinambungan bagi pelaku industri mikro dan rumah tangga agar terus berkembang dan tangguh menghadapi tantangan disrupsi (Fristia & Navastara, 2014).

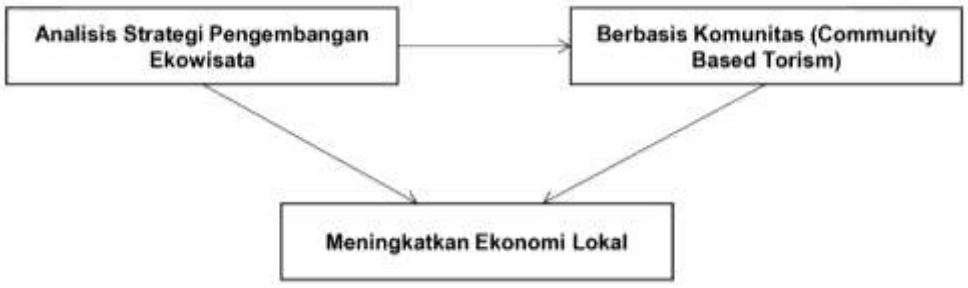
**Komunitas (Community Based Tourism)**

*Community Based Tourism* (CBT) merupakan kerangka tata kelola pariwisata berpendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor hierarki tertinggi dalam inisiasi, pengelolaan, hingga pengambilan keputusan strategis. Konsep ini bertujuan memangkas marginalisasi dengan memastikan perputaran keuntungan dan operasional pariwisata dikelola secara mandiri oleh institusi kerakyatan lokal tanpa ketergantungan pada investor luar (Nasikun, 2001). Secara empiris, CBT terbukti lebih ramah ekologi dan efektif memitigasi dampak negatif sosiokultural dari pariwisata masif (*mass tourism*). Dengan menjunjung asas kepemilikan kolektif warga, pemerataan hasil usaha, perlindungan martabat sosial, dan pelestarian lingkungan, CBT memberikan wewenang penuh kepada masyarakat untuk menggerakkan roda ekonomi demi kesejahteraannya sekaligus merawat ekosistem alam secara berkelanjutan.

**Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran penelitian ini dirancang secara sistematis untuk membedah strategi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Skema konseptual ini menggambarkan hubungan kausalitas antara upaya konservasi lanskap Taman Nasional, optimalisasi tata kelola warga lokal (CBT), dan dukungan pemangku kebijakan. Sinergi ketiga elemen tersebut diproyeksikan bermuara pada penciptaan lapangan kerja dan stabilitas ekonomi sebagai wujud mitigasi kemiskinan warga di Kawasan Penyangga Taman Nasional Tambora, yang divisualisasikan secara struktural melalui bagan alir dan matriks analitik berikut.

**Gambar 1. Kerangka Berpikir**




**Tabel 1. Matriks Keterkaitan dan Peran**

| Elemen | Peran Utama | Fokus Kegiatan | Dampak Terhadap Elemen Lain |
|---|---|---|---|
| Ekowisata | Penyedia produk pariwisata berkelanjutan | Konservasi alam, edukasi lingkungan, wisata minim dampak (*low-impact*) | Menyediakan daya tarik wisata yang bernilai jual tinggi secara alami. |
| CBT | Wadah partisipasi & tata kelola komunitas | Pelatihan SDM, pembentukan Pokdarwis, pengambilan keputusan bersama | Memastikan rantai pasok pariwisata dikuasai warga lokal, bukan investor luar. |
| Ekonomi Lokal | Indikator keberhasilan & dampak | Pembentukan UMKM wisata, diversifikasi pendapatan warga, lapangan kerja baru | Memberi dorongan ekonomi kepada warga agar sukarela merawat lingkungan ekowisata. |

Sumber: Peneliti, 2026

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, dan menjelaskan suatu fenomena secara sistematis dan logis tanpa rekayasa variabel (Sugiyono, 2018). Pendekatan ini difokuskan untuk mengumpulkan data deskriptif

secara mendalam baik berupa kata-kata lisan, tulisan, maupun perilaku yang diamati guna memotret realitas empiris terkait status dan peristiwa yang terjadi di lapangan (Hasri, 2024). Adapun pelaksanaan riset ini difokuskan pada Kawasan Penyangga Taman Nasional Tambora, tepatnya di Desa Tambora, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang sarat akan potensi ekowisata namun masih membutuhkan perumusan strategi tata kelola yang lebih komprehensif.

Dalam pelaksanaan riset ini, peneliti menggali dua jenis sumber data utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui interaksi dan *cross-check* (triangulasi) dengan pihak swasta, Dinas Pariwisata, dan Dinas Sosial Kabupaten Dompu, sedangkan data sekunder dihimpun dari literatur buku, dokumentasi perpustakaan, serta catatan atau transkrip publikasi dari instansi terkait. Guna memperoleh data yang akurat, teknik pengumpulan data dieksekusi melalui tiga instrumen utama: observasi non-partisipan untuk membuktikan fenomena sosiologis sebagai pengamat langsung, wawancara bebas terpimpin untuk menggali informasi mendalam dan objektif dari para narasumber kunci, serta metode dokumentasi untuk melengkapi bukti-bukti administratif.

Mengingat instrumen utama dalam riset kualitatif adalah peneliti itu sendiri, maka pengujian keabsahan data (*trustworthiness*) dilakukan secara ketat melalui teknik triangulasi metode dan sumber untuk membandingkan ragam informasi yang diperoleh (Moleong, 2017; Nofriansyah, 2018). Pengecekan keabsahan ini juga dapat dikombinasikan dengan prosedur validitas lain seperti perpanjangan pengamatan dan *member checking* sesuai kerangka paradigma penelitian (Wahidmurni, 2017). Setelah data dinyatakan valid, tahapan selanjutnya adalah menganalisis data menggunakan model interaktif yang mencakup proses pengumpulan data, kondensasi data (*data condensation*), dan penyajian data (*data display*) (Hasri, 2024). Pada tahap akhir, data yang telah direduksi tersebut dibedah menggunakan kerangka Analisis SWOT untuk mengidentifikasi situasi internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan ancaman) secara sistematis, yang bermuara pada lahirnya solusi perumusan strategi pengembangan destinasi ekowisata yang terukur.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Identifikasi Potensi Ekowisata di Kawasan Penyangga Tambora

Kawasan Penyangga Taman Nasional Tambora memiliki inventarisasi kekayaan alam dan sejarah yang bernilai jual tinggi sebagai daya tarik utama pariwisata. Dari segi lanskap alam, kawasan ini menawarkan keeksotisan jalur pendakian menuju kaldera bersejarah Gunung Tambora, area *jungle tracking* yang membelah hutan tropis dengan keanekaragaman flora dan fauna endemik, serta potensi wisata tirta di aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun. Kondisi topografi yang menantang ini juga sangat mendukung pengembangan pariwisata minat khusus bagi para wisatawan petualang, mulai dari aktivitas paralayang, panjat tebing, rute *offroad*, hingga lokasi *bird watching*.

Di samping kekayaan alamnya, kawasan ini juga menyimpan potensi agrowisata dan daya tarik sosial budaya yang kuat. Masyarakat di kawasan penyangga memiliki komoditas unggulan berupa Perkebunan Kopi Tambora yang sangat prospektif untuk diintegrasikan sebagai paket wisata edukasi. Lebih dari itu, kearifan lokal dan harmoni rutinitas keseharian warga desa yang masih sangat asri dan otentik menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang mendambakan pengalaman orisinalitas kealaman (*natural originality*).

#### Partisipasi Masyarakat Lokal dan Implementasi CBT Saat Ini

Dalam konteks pemberdayaan warga, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lokal di Kawasan Penyangga Tambora masih berada pada tahap inisiasi dan belum terstruktur secara optimal. Sebagian warga sejatinya telah mulai mengambil peran ekonomi secara mandiri, seperti menjadi penyedia jasa pemandu wisata (*guide*) non-formal, jasa *porter*, hingga menyewakan sebagian ruang rumahnya sebagai *homestay* sederhana bagi para pendaki. Namun, inisiatif sporadis ini belum didukung oleh kematangan kelembagaan lokal. Meskipun Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) telah terbentuk secara administratif di tingkat desa, fungsinya belum berjalan maksimal akibat minimnya edukasi mengenai standar pelayanan pariwisata (*hospitality*), rendahnya pemahaman manajerial, serta keterbatasan akses modal usaha.

Kondisi tersebut diperparah oleh fenomena ego-sektoral dan belum terjalinnya sinergitas yang kohesif antar-pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pihak pengelola Taman Nasional di bawah kewenangan pemerintah pusat, Dinas Pariwisata daerah, entitas swasta, dan masyarakat desa masih tampak parsial. Akibatnya, rantai pasok pariwisata belum sepenuhnya dikuasai oleh warga lokal, dan perputaran uang dari pengeluaran wisatawan lebih banyak mengalir ke luar kawasan. Hal ini menyebabkan sektor ekowisata yang berjalan saat ini gagal memberikan efek ganda (*multiplier effect*) yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan di area tersebut.

**Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal (Analisis SWOT)**

Guna merumuskan strategi pengembangan yang terukur, seluruh temuan lapangan direduksi ke dalam identifikasi faktor internal kawasan yang mencakup komponen kekuatan dan kelemahan. Kekuatan utama (*strengths*) destinasi ini terletak pada nilai sejarah global dari letusan Gunung Tambora, keanekaragaman atraksi alam yang sangat komprehensif, keramahan sosiokultural masyarakat lokal, serta ketersediaan ruang untuk komoditas kearifan lokal. Akan tetapi, upaya pengembangan tersebut masih terganjal oleh sejumlah kelemahan dominan (*weaknesses*). Kelemahan tersebut meliputi rendahnya kualitas kapabilitas sumber daya manusia dalam mengelola CBT, minimnya infrastruktur dasar seperti akses jalan dan ketersediaan air bersih, keterbatasan fasilitas penunjang wisata, serta sistem promosi yang belum terintegrasi secara digital.

Sementara itu, dari sisi pemetaan faktor eksternal, terdapat serangkaian peluang (*opportunities*) besar yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan pengembangan kawasan. Peluang tersebut mencakup pergeseran tren pariwisata global pasca-pandemi yang semakin meminati wisata alam terbuka, dukungan kebijakan strategis dari Pemerintah Provinsi NTB yang menjadikan Tambora sebagai destinasi prioritas, serta terbukanya akses kemitraan pendanaan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) maupun lembaga non-pemerintah (NGO). Meskipun demikian, pengembangan kawasan ini juga dibayangi oleh ancaman nyata (*threats*), di antaranya risiko degradasi ekologi dan penumpukan sampah akibat perilaku pengunjung jika tidak dikelola secara konservatif, ketatnya persaingan dengan destinasi alam mapan lain di NTB seperti Gunung Rinjani, serta ancaman masuknya dominasi investor kapitalis dari luar yang berpotensi memarginalkan hak-hak ekonomi warga desa.

**Pembahasan**

**Potensi dan Kendala Pengembangan Ekowisata di Kawasan Penyangga Tambora**

Hasil identifikasi lapangan mengonfirmasi bahwa Kawasan Penyangga Taman Nasional Tambora memiliki daya dukung atraksi ekowisata yang berdaya saing tinggi, meliputi wisata alam (kaldera, *jungle tracking*), wisata minat khusus (paralayang, *bird watching*), dan agrowisata (Kopi Tambora). Fakta ini sejalan dengan temuan Argubi dan Hendra (2018) yang menyatakan bahwa lanskap Tambora memancarkan daya pikat *ecotourism* yang paripurna berkat perpaduan nilai sejarah global dan fenomena geologisnya. Jika dikaitkan dengan teori tren pariwisata dari Juhanda (2013), kekayaan yang dimiliki Tambora ini merupakan representasi sempurna dari konsep *natural originality* (orisinalitas kealaman) yang saat ini sangat diburu oleh pasar wisatawan global pasca-pandemi. Destinasi ini menawarkan pengalaman yang unik (*unique*) dan langka (*scarce*).

Kendati demikian, tingginya potensi tersebut masih terbentur oleh kendala internal berupa rendahnya kualitas infrastruktur dasar dan minimnya fasilitas penunjang wisata. Merujuk pada pandangan Yoeti (2008) mengenai definisi ekowisata, sebuah destinasi tidak dapat disebut sebagai ekowisata yang ideal apabila tidak dikemas secara profesional dan tidak mampu menjamin kenyamanan serta edukasi bagi pengunjungnya. Terhambatnya pembangunan fasilitas fisik ini menjadi paradoks, di mana kawasan penyangga yang seharusnya memfasilitasi kebutuhan wisatawan sebelum memasuki zona inti Taman Nasional, justru belum memiliki standardisasi kelayakan infrastruktur yang memadai.

**Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Kerangka CBT**

Tujuan kedua dari penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana partisipasi warga dalam tata kelola pariwisata. Fakta empiris menunjukkan bahwa masyarakat lokal Tambora telah menginisiasi peran ekonomi mikro, seperti penyediaan *homestay* dan jasa pemandu, namun gerakannya masih bersifat

sporadis dan terfragmentasi. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai representasi institusi masyarakat belum memiliki kapasitas kelembagaan dan manajerial yang matang. Temuan ini merefleksikan kegagalan pemenuhan prinsip dasar *Community Based Tourism* (CBT) yang digagas oleh Nasikun (2001), di mana kelembagaan masyarakat seharusnya menjadi pemegang hak veto tertinggi dalam tata kelola destinasi, bukan sekadar pelengkap penderita.

Lebih lanjut, belum terjalinnya sinergitas yang kohesif antara pemerintah pusat (Pengelola Taman Nasional), Dinas Pariwisata, dan masyarakat desa menjadi akar masalah rendahnya *multiplier effect* (efek ganda) pariwisata terhadap pengentasan kemiskinan di Tambora (Sari, 2011). Mengacu pada teori Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dari Blakely dan Bradshaw (2002) serta Helmsing (2001), keberhasilan ekonomi lokal sangat bergantung pada harmonisasi lintas sektoral (*collaborative partnership*). Ketiadaan sinergi ini mengakibatkan rantai pasok pariwisata mudah dikendalikan oleh agen perjalanan dari luar daerah, sehingga perputaran profit gagal mengakar di dompet keluarga warga setempat dan mencederai filosofi pemberdayaan ekonomi inklusif.

**Rumusan Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis CBT (Analisis SWOT)**

Demi mewujudkan tata kelola destinasi yang progresif, peneliti membedah temuan lapangan menggunakan matriks Analisis SWOT. Mengacu pada pandangan Suryono (dalam Primadany et al., 2013) serta Grede (dalam Hasri, 2024), strategi merupakan perpaduan antara kebijakan operasional dan metode alokasi sumber daya untuk meretas kebuntuan tata kelola. Berdasarkan interaksi antara faktor Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*), maka dirumuskan empat strategi komprehensif sebagai berikut:

- **Strategi S-O (*Strengths - Opportunities*)**
  Strategi ini berfokus pada pemanfaatan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal. Kawasan Tambora harus mereposisi *branding* wisatanya dengan mengintegrasikan pesona kaldera dan Perkebunan Kopi Tambora guna menangkap pergeseran minat wisatawan global menuju wisata keberlanjutan. Pemerintah daerah dan masyarakat harus proaktif memanfaatkan kebijakan prioritas pariwisata dari Pemprov NTB dengan mengajukan desain paket wisata sejarah (*heritage trail*) yang dikelola langsung oleh kelompok lokal.

- **Strategi W-O (*Weaknesses - Opportunities*)**
  Untuk mengatasi kelemahan kapabilitas SDM dan keterbatasan modal, masyarakat melalui Pokdarwis wajib didorong untuk memfasilitasi kerja sama dengan NGO lingkungan atau skema CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari sektor swasta. Kemitraan ini ditujukan secara spesifik untuk menggelar pelatihan *hospitality*, sertifikasi *guide* lokal, serta inkubasi UMKM wisata. Bersamaan dengan itu, bantuan CSR dapat diarahkan untuk mendigitalkan promosi ekowisata Tambora agar aksesibilitas pasarnya menjadi tak terbatas.

- **Strategi S-T (*Strengths - Threats*)**
  Strategi protektif ini dirancang untuk menahan laju ancaman degradasi ekologi dan invasi pemodal luar dengan menggunakan instrumen kearifan lokal. Warga desa perlu merumuskan Peraturan Desa (Perdes) atau sanksi adat terkait konservasi tata ruang, pembatasan kuota pendaki, manajemen sampah (*zero waste protocol*), dan regulasi zonasi investasi. Hal ini mutlak dilakukan agar entitas bisnis kerakyatan tidak termarginalkan oleh kekuatan kapitalis raksasa, sesuai dengan mandat keadilan dalam prinsip CBT (Nasikun, 2001).

- **Strategi W-T (*Weaknesses - Threats*)**
  Guna memenangkan persaingan dengan destinasi mapan seperti Gunung Rinjani, strategi defensif yang harus dieksekusi adalah pembenahan infrastruktur dasar (seperti air bersih, sanitasi, dan akses jalan) yang bersumber dari Dana Desa, kolaborasi lintas dinas, atau *crowdfunding*. Bersamaan dengan itu, Pokdarwis harus direstrukturisasi dengan injeksi manajerial yang modern agar mampu memberikan pelayanan prima secara profesional, sehingga citra Tambora bangkit sebagai destinasi ekowisata kelas dunia yang dikelola secara eksklusif oleh masyarakatnya sendiri.

## 5. KESIMPULAN

Kawasan Penyangga Taman Nasional Tambora memiliki potensi ekowisata yang berdaya saing tinggi, yang mencakup kekayaan lanskap alam, nilai sejarah kaldera, atraksi minat khusus, hingga agrowisata komoditas lokal. Meskipun memiliki potensi besar, implementasi pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) di kawasan tersebut masih berada pada tahap inisiasi dengan inisiatif warga yang bersifat sporadis. Upaya pemberdayaan ekonomi lokal saat ini masih terhambat oleh lemahnya kapasitas manajerial kelembagaan masyarakat (Pokdarwis), keterbatasan infrastruktur dasar pariwisata, serta ketiadaan sinergi yang kohesif antara pemerintah, swasta, dan warga desa. Hal ini mengakibatkan perputaran ekonomi dari sektor pariwisata gagal memberikan efek ganda (*multiplier effect*) yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat setempat.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, diperlukan implementasi strategi pengembangan yang komprehensif berdasarkan pemetaan Analisis SWOT. Optimalisasi aset sejarah dan alam Tambora harus diiringi dengan strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia serta revitalisasi kelembagaan lokal melalui jalinan kemitraan pendanaan dan digitalisasi bersama NGO atau pihak swasta. Lebih dari itu, pelestarian kawasan ekowisata juga menuntut adanya strategi protektif berupa perumusan regulasi konservasi berbasis adat atau Peraturan Desa (Perdes). Langkah strategis ini sangat krusial untuk melindungi ekologi kawasan dari ancaman degradasi sekaligus mencegah terjadinya marginalisasi hak-hak ekonomi warga oleh dominasi investor luar, sehingga pariwisata Tambora dapat berkembang secara mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

## REFERENSI


Andayani, W., Laily, N., & Aini, N. (2024). Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Era Digital: Memperkuat UMKM untuk Mencapai Sustainable Development Goals dalam Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 6*(1), 438–446. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.1.4977

Anuar, A. N. A., & Sood, N. A. A. M. (2017). Community based tourism: Understanding, benefits and challenges. *Journal of Tourism & Hospitality, 6*(1), 1-2. https://doi.org/10.4172/2167-0269.1000263

Argubi, A. H., & Hendra. (2018). Profil Ecotourism di Taman Nasional Gunung Tambora. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 15*(3), 85-92.

Aziz, A. (2008). *Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata: Studi Konseptual*.

Blakely, E. J., & Bradshaw, T. K. (2002). *Planning local economic development: Theory and practice* (3rd ed.). SAGE Publications.

Bramsah, M., & Darmawan, A. (2017). Potensi Lansekap Untuk Pengembangan Ekowisata Di Hutan Lindung Register 25 Pematang Tanggang Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Sylva Lestari, 5*(2), 12–22. https://doi.org/10.23960/jsl2512-22

Fristia, N. I., & Navastara, A. M. (2014). Faktor Penyebab Belum Berkembangnya Industri Kecil Batik Desa Kenongo Kecamatan Tulangan-Sidoarjo. *Jurnal Teknik ITS, 3*(1), C13-C16. https://doi.org/10.12962/j23373539.v3i1.5979

Giampiccoli, A., Jugmohan, S., & Mtapuri, O. (2014). Community-based tourism in rich and poor countries: Towards a framework for comparison. *African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance, 20*(4), 1200-1216.

Hakim, A., Bi Rahmani, N., & Harahap, R. D. (2024). Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainabel Development Goals (SDGs) di Kawasan Danau Toba. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 7*(1), 419–433. https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1434

Hamzah, A., & Khalifah, Z. (2009). *Handbook on Community Based Tourism: How to Develop and Sustain CBT*. APEC Secretariat.

Handayani, S., Saifuddin, & Damayanti, R. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 7*(1), 153–165. https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).15987

Hasri. (2024). *Kajian Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat*. Laporan Riset Pariwisata NTB.

Helmsing, A. H. J. (2001). Externalities, learning and governance: New perspectives on local economic development. *Development and Change, 32*(2), 277-308. https://doi.org/10.1111/1467-7660.00206

Hidayah, N. (2020). *Pemberdayaan Pemuda Melalui Komunitas Pecinta Alam dalam Strategi Pengembangan Ekowisata Melalui Konsep Community Based Tourism* [Skripsi/Undergraduate thesis]. Universitas Islam Sultan Agung.

International Labour Organization (ILO). (2005). *Local economic development in post-crisis situations*. ILO Publications.

Juhanda, A. (2013). Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata. *Jurnal Pariwisata Terapan, 12*(1), 12-18.

Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 6*(1), 68–84. https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Mtapuri, O., & Giampiccoli, A. (2016). Community-based tourism: From a local to a global push. *Acta Commercii, 16*(1), 1-10. https://doi.org/10.4102/ac.v16i1.372

Muljadi, A. J. (2009). *Kepariwisataan dan Perjalanan*. PT RajaGrafindo Persada.

Nasikun. (2001). *Isu dan Kebijakan Pariwisata Alternatif*. Pustaka Pelajar.

Negara, I. D. M. K. S., Negara, F., & Sari, R. J. (2024). Evaluasi Peluang dan Hambatan dalam Mengelola Destinasi Wisata Pantai dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Bisnis, 3*(7), 1169–1178. https://doi.org/10.22334/paris.v3i7.833

Nofriansyah, D. (2018). *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Deepublish.

Nurhidayati, S. E., & Fandeli, C. (2012). Penerapan Prinsip Community Based Tourism (CBT) Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kota Batu, Jawa Timur. *Jejaring Administrasi Publik, 4*(1), 36–46.

Primadany, S. R., Mardiyono, & Riyanto. (2013). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik, 1*(4), 135-143.

Rahayu, S., & Dewi, U. (2016). Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora, 21*(1), 1-13.

Safitri, D., & Whinarko. (2020). Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*.

Sahupala, A. (2023). Identifikasi Potensi Daya Tarik Ekowisata di Zona Pemanfaatan Taman Nasional Manusela Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil, 7*(1), 33–42. https://doi.org/10.30598/jhppk.v7i1.9001

Sanjaya. (2018). *Pengembangan Desa Wisata dan Dampak Lingkungannya*.

Sari, P. (2011). *Potensi Industri Pariwisata dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*.

Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.

Suswanto, B. (2004). *Manajemen Kepariwisataan*. BPFE.

Tyana, I., & Satlita, L. (2023). Pengembangan Pariwisata Berbasis Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Pandanrejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. *Journal of Public Policy and Administration Research (Jurnal Ilmu Sosial dan Manajemen Pariwisata)*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan. (1990). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009.

UNWTO. (2015). *Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030*. World Tourism Organization.

Wahidmurni. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Repositori Institusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

World Bank. (2001). *Local Economic Development: A Primer Developing and Implementing Local Economic Development Strategies and Action Plans*. World Bank Publications.

Yanti, M., & Fajri, H. (2023). Analisis Relasi Kuasa Dalam Pengembangan Tata Kelola Pariwisata Berbasis Komunitas: Sebuah Pemetaan Bibliometrik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), 7*(3), 2598–9944. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5439

Yoeti, O. A. (2008). *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. PT Kompas Media Nusantara.

Zukharman, Sudirman, & Asriyadin. (2023). *Konsep Homestay Berkelanjutan Sebagai Fasilitas Ekowisata dalam Pendekatan CBT*.